

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang kepemimpinan berbasis kebudayaan tradisional, tidak bisa dipisahkan dari eksistensi manusia Timor di Biboki. Manusia dan kebudayaan sendiri memiliki hubungan saling menciptakan dan melengkapi satu dengan yang lain. Setiap kali menyebut kata kebudayaan, yang dipahami dan dihayati adalah eksistensi manusia. Kebudayaan itu milik manusia, diciptakan manusia dan dipergunakan sebagai sarana hidup. Dari tindakan manusia menerima dan menjadikan kebudayaan sebagai pandangan hidupnya, terimplisit bahwa manusia menerima suatu tanggungjawab yang berat untuk menghidupkan kebudayaan selama-lamanya. Implikasinya agar kebudayaan yang merupakan tradisi warisan nenek moyang sejak “Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya,”(Kej 1:1-2:7) tetap dijaga dan dilestarikan.

Dalam Kebudayaan ada kebiasaan yang dipelajari oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk membantu masyarakat dalam membangun relasi antar sesama di dalam hidupnya. Dalam membangun relasi, manusia tidak pernah terlepas dari komunikasi-komunikasi yang bernilai dan bermoral. Baik bagi dirinya sendiri maupun dengan hal-hal di luar dirinya. Ada sesama manusia, ada dunia tempat dimana ia bisa bereksistensi dan ada sesuatu yang paling fundamen dan urgen yaitu sesuatu yang transenden. Ia ada sebagai

pencipta dan Ia juga adalah tujuan dari hidup manusia. Ia adalah Yang Melingkupi (*das Umgreifende*) segala sesuatu.¹ Gereja katolik dalam konsili Vatikan II menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan dengan yang lainnya, melainkan persatuan mesra antara Allah dengan kesatuan seluruh umat manusia.² Hidup sosial dan kebudayaan menentukan hidup manusia yang konkrit. Di dalam hidup sosial dan kebudayaan manusia menentukan iman dan agamanya. Iman yang konkret selalu menyangkut hidup yang konkret dan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat serta kebudayaan.

Dari relasi-relasi itu terciptalah sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang mentradisi dan dijadikan milik bersama untuk dipelajari bagi setiap generasi.³ Secara implisit dapat ditemukan dalam organisasi sosial yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang mengatur masyarakat demi terciptanya *bonum commune* (kebaikan bersama). Salah satu bentuk organisasi sosial yang diciptakan oleh masyarakat tradisional yaitu sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat adat. Di dalam produk masyarakat adat tersebut, terdapat nilai-nilai yang sifatnya mengatur tatanan hidup masyarakat namun diterima oleh masyarakat sebagai pedoman hidup.

Sejak tahun 2013 Negara Indonesia mulai merevitalisasi desa adat yang merupakan proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Pada tahun 2018, Direktorat Jendral Kebudayaan

¹M. Sastrapratedja, (editor), *Manusia Multidimensional, (Tentang Filsafat Eksistensialis Karl Jaspers, Tulisan Hamersa)*, (Yogyakarta :Kanisius, 1986), hal. 55.

² Dokumen Konsili Vatikan II, R. Hardawiryana *Terj. Nostra Aetate*, (Jakarta: Obor, 2013), hal. 319

³ Konrad Kebung, *Filsafat Berpikir Orang Timur*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 247.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan revitalisasi desa adat memberikan bantuan pemerintah untuk merevitalisasi desa-desa adat dalam rangka melestarikan kebudayaan. Kegiatan revitalisasi desa adat tahun 2018 sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sebagai upaya pelestarian tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.⁴

Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara secara administrasi dikenal ada tiga kerajaan besar yaitu Kerajaan Miomafo, Kerajaan Insana dan Kerajaan Biboki. Kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang adalah Kerajaan Biboki yang pusat kerajaannya adalah Tamkesi. Wilayah Tamkesi sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, ditetapkan sebagai Desa Adat.⁵

Pemimpin tertinggi di Kerajaan Biboki yang berpusat di Tamkesi adalah seorang raja atau yang biasanya disebut *Koko*.⁶ Dalam mengatur masyarakatnya, raja dibantu oleh para pegawai yang disebut *Amaf*. Meskipun nampak kepemimpinan berpusat pada raja, namun hal itu tidak mempengaruhi keharmonisan kehidupan masyarakat Biboki. Masyarakat Kerajaan Biboki tetap

⁴ Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Revitalisasi Desa Adat*, (Jakarta: 2018), hal. 4

⁵ Suyanto, *Profil Pranata Sosial Di Daerah Komunitas Adat Terpencil (Studi Kehidupan Sosial Budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur)*, (Jakarta: Universitas Muhamadiyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1889), hal. 31.

⁶ Gregor Neonbasu, *We Seek Our Roots: Oral Tradition in Biboki, West Timor*, (Jerman: Academic Press Fribourg Switzerland, 2011), p. 173-177

hidup dengan aman dan harmonis di bawah pemerintahan kerajaan. Hal ini dapat terjadi karena raja memiliki integritas diri, moralitas dan spiritualitas yang terwujud lewat sikapnya yang bijaksana, tanggung jawab dan lemah-lembut dalam memimpin masyarakatnya. Lebih dari sifat-sifat lahiriah tersebut masyarakat Biboki memandang rajanya sebagai pribadi yang sakral. Raja diyakini memiliki hubungan erat dengan sesuatu yang supranatural, alam dan *Usi Neno* (Tuhan Langit). Raja Biboki bahkan diyakini sebagai *Neno Anan ma Funan Anan* yang artinya, ‘putra langit dan putra bulan’.⁷ Keyakinan ini ditampilkan dalam praktek dan ritus adat yang dijalankan di dalam kehidupan masyarakat.

Kesakralan Raja Biboki membawa pengaruh yang besar bagi struktur pemerintahan Kerajaan Biboki. Masyarakat kemudian tidak hanya memandang rajanya sebagai pribadi yang sakral namun juga melihat tokoh struktural yang memimpin dalam struktur pemerintahan Kerajaan Adat Biboki sebagai pribadi yang sakral. Kepemimpinan dalam pemahaman mereka adalah suatu jabatan yang diberikan dari *Uis Neno* (‘Tuhan Langit’).⁸ Sebagai pemberian dari Tuhan maka kepemimpinan itu dilihat sebagai sesuatu yang sakral. Pemimpin-pemimpin masyarakat Biboki mulai dari kepala-kepala suku hingga Raja Biboki pun menghayati kepemimpinan sebagai suatu pemberian dari Tuhan. Sehingga penghormatan yang masyarakat berikan kepada pemimpinnya bukanlah suatu penghormatan karena adanya paksaan, intimidasi ataupun teror dari pemerintah kerajaan, melainkan suatu kesadaran akan nilai sakralitas dalam diri pemimpin.

⁷ Lukas Usboko, dan disetujui oleh enam narasumber lainnya, *Wawancara*, Oemasi, 04 Oktober 2017, Tersimpan Dalam Rekaman.

⁸ Leo Luan Usboko, dan disetujui oleh enam narasumber lainnya, *Wawancara*, Desa Adat Tamkesi, 17 Sempetember 2017, Tersimpan Dalam Rekaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan dan tindakan tersebut tidak ditemukan lagi dalam generasi sekarang akibat pergeseran pola pikir karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Pengaruh lajunya perkembangan globalisasi dan modernisasi membawa dampak yang buruk bagi generasi masyarakat Biboki dewasa ini. Terutama dalam melihat, mengartikan dan menghayati budaya tradisional dalam hal ini nilai-nilai budaya yang diwariskan sejak dahulu oleh generasi-generasi sebelumnya. Kurangnya penghayatan masyarakat Biboki terhadap nilai-nilai budaya tradisional teristimewa sakralitas kepemimpinan, mengindikasikan bahwa penghayatan masyarakat Biboki terhadap nilai sakralitas kepemimpinan mengalami degradasi. Ironinya sebagian besar barisan struktural kepemimpinan adat masyarakat Biboki tidak menghayati nilai sakralitas kepemimpinan dalam hidupnya. Ada indikasi bahwa nilai sakral kepemimpinan yang mentradisi dan merupakan warisan dari nenek moyang terancam punah.

Pada kehidupan generasi-generasi sebelumnya yang terdapat pada pemerintahan asli Kerajaan Biboki, Raja Biboki tidak pernah menampakan diri kepada masyarakatnya pada moment yang tidak resmi. Raja Biboki juga tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana masyarakat awam karena dianggap tabu, sebab raja adalah pribadi yang sakral. Selain itu Raja Biboki dan barisan struktural Kerajaan Biboki selalu bertanggung jawab dengan tugas mereka di Tamkesi yang merupakan pusat Kerajaan Biboki. Mereka juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat Biboki yang terbentuk dalam suku-suku, sehingga masyarakat Biboki selalu hidup dengan harmonis dan sejahtera.

Berbeda dengan situasi sekarang, Raja Biboki bekerja sebagaimana masyarakat awam dan sering dilihat oleh masyarakat. Raja Biboki tidak lagi tinggal di Tamkesi, saat ini Raja Biboki tinggal di Desa Oepuah Kecamatan Biboki Selatan.⁹ Pemimpin-pemimpin suku tidak lagi aktif dalam urusan kerajaan. Tanggung jawab mereka terhadap sukunya terlihat lemah. Sehingga ada kemunduran kewibawaan pemimpin di mata masyarakat dan muncul indikasi akan punahnya sistem organisasi sosial masyarakat Tamkesi dalam hal ini Kerajaan Biboki.

Berdasarkan kepedulian pemerintah dan gereja katolik terhadap budaya lokal serta visi Universitas Widya Mandira sebagai komunitas pendidikan dan komunitas akademi yang unggul dan kreatif dengan menhayati nilai-nilai kristiani, berwawasan global dan berakar pada budaya lokal, dan berkaca pada fenomena-fenomena bersejarah terdahulu, sebagai pribadi yang tinggal dalam wilayah Kerajaan Biboki dan lahir dari rahim seorang ibu yang merupakan *Fatnai Naimnune* yang berarti ‘keturunan raja’,¹⁰ maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang nilai-nilai kepemimpinan teristimewa sakralitas kepemimpinan dalam struktur pemerintahan Kerajaan Biboki di Kabupaten Timor Tengah Utara yang akan dikaji penulis dalam judul: **“Restorasi Sakralitas Kepemimpinan Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki (Desa Adat Tamkesi Kecamatan Biboki Selatan).”**

⁹ Desa Oepuah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten TTU kecamatan Biboki Selatan. Wilayah ini juga masuk dalam wilayah Kerajaan Biboki. Jarak dari Desa Oepuah ke Tamkesi ± 40 km.

¹⁰ *Fatnai Naimnune* adalah istilah yang diberikan kepada anak-cucu raja atau keturunan raja. Karena di dalam dirinya terdapat darah bangsawaan. Lukas Usboko, dan disetujui oleh enam narasumber lainnya *Wawacara*, Oemasi, 04 Oktober 2017, Tersimpan Dalam Rekaman.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memperdalam masalah ini maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa itu masyarakat Adat Tamkesi dan bagaimana historitas struktur pemerintahan asli Kerajaan Biboki?
2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Biboki?
3. Bagaimana upaya restorasi sakralitas kepemimpinan Kerajaan Biboki yang selaras zaman?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk menjawab perumusan masalah yang menjadi bahan kajian penulis.
2. Memperdalam dan merestorasi nilai-nilai yang terkandung dalam struktur pemerintahan asli kerajaan Biboki di Desa Adat Tamkesi khususnya sakralitas kepemimpinan.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan demi memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Fakultas

1. Penulis berharap bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para mahasiswa agar mempunyai minat untuk mengenal dan mengkaji nilai-nilai budaya asli yang ada di daerah masing-masing.
2. Sebagai sumbangan bagi civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira pada umumnya dan Fakultas Filsafat khususnya dalam konteks mengenal dan memahami nilai-nilai kepemimpinan, teristimewa sakralitas kepemimpinan dalam Struktur Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki.

1.4.2 Bagi Penulis

1. Tulisan ini dapat membantu penulis agar semakin mengenal budaya sendiri dan mengambil nilai positifnya demi memperkaya diri di dalam perjalanan hidup ini.
2. Sebagai kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang sakralitas kepemimpinan dalam Struktur Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki yang lokasi penelitian penulis ialah di Desa Adat Tamkesi.

1.4.3 Bagi Masyarakat Biboki di Desa Adat Tamkesi

1. Penulis memberikan sumbangan pemikiran bagi barisan struktural pemimpin Kerajaan Biboki untuk merestorasi nilai sakralitas kepemimpinan sesuai dengan yang telah diwariskan secara turun temurun.

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk membantu masyarakat Biboki di Desa Adat Tamkesi khususnya para kaum muda agar mereka mengenal peninggalan kebudayaan lokal yang secara khusus berkaitan dengan sakralitas kepemimpinan dalam Pemerintahan Kerajaan Biboki.
3. Sebagai sumbangan bagi masyarakat Biboki untuk menyadari arti dan makna dari sakralitas kepemimpinan dalam Struktur Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki.
4. Agar masyarakat Biboki yang membaca tulisan ini dapat sadar dan kembali menghayati sakralitas kepemimpinan yang telah diwariskan turun temurun yang secara implisit pernah ada dalam Struktur Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki dan menjadikannya sebagai modal dan model dalam membangun suatu kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.

1.5 Metodologi Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggali dan merestorasi sakralitas kepemimpinan dalam pemerintahan asli Kerajaan Biboki. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Adat Tamkesi yang merupakan pusat dari Kerajaan Biboki. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang sesuai dengan kajian budaya dan berbeda dari kajian ilmu-ilmu lain yang bersifat kuantitatif. Dalam tradisi kajian budaya hanya ada tiga hal yang diteliti yakni produk budaya, praktek budaya dan makna budaya yang berpihak pada budaya-budaya kecil dan tersisikan.

Sebagai jenis penelitian kualitatif metode penelitian ini dikaji dalam tiga cara yaitu: cara memperoleh data, cara analisis data dan cara menyajikan data. Data primer tulisan ini diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi langsung dengan para responden. Penelitian dilaksanakan dengan cara wawancara langsung para responden yang terpercaya dan mampu memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Orang-orang yang diwawancara adalah tua-tua adat yang benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan memahami sakralitas kepemimpinan dalam masyarakat Biboki. Wawancara dilakukan secara bebas dalam suasana kekeluargaan dan terbuka dengan berpedoman pada indikator dengan variabel sebagai berikut: Pertama, tentang gambaran umum masyarakat Biboki khususnya masyarakat di Desa Adat Tamkesi. Kedua, deskripsi tentang sejarah dan Struktur Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki. Ketiga, menjelaskan sakralitas kepemimpinan dalam masyarakat Kerajaan Biboki.

Selain penelitian lapangan penulis juga menganalisis dan menyajikan data lewat studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan struktur kepemimpinan masyarakat Biboki dan sakralitas kepemimpinan. Penulis mengumpulkan informasi-informasi mengenai sakralitas kepemimpinan dan struktur kepemimpinan yang ada hubungannya dengan variabel di atas. Berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan lapangan, penulis mengolahnya dengan membuat penafsiran filosofis dan teologis terhadap objek

studi sakralitas kepemimpinan dalam struktur pemerintahan asli Kerajaan Biboki. Untuk menyajikan data kualitatif ini, penulis melakukan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis tulisan ini tertata dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, dimana penulis menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, hipotesis, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab II penulis memaparkan gambaran umum Masyarakat Desa Adat Tamkesi dan Kerajaan Biboki yang meliputi deskripsi wilayah yang terdiri atas letak dan keadaan geografis wilayah penelitian, flora, fauna, dan kebudayaan yang secara spesifik diuraikan dalam unsur-unsur kebudayaan masyarakat Biboki di Desa Adat Tamkesi.

Bab III penulis memaparkan dan mendeskripsikan tentang struktur pemerintahan asli Kerajaan Biboki dan tugas struktural kepemimpinan dalam pemerintahan Kerajaan Biboki.

Bab IV penulis menjelaskan tentang nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Biboki dan restorasi sakralitas kepemimpinan.

Bab V peneliti menutup seluruh uraian dengan kesimpulan dan saran.